

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan proyeksi perekonomian Kabupaten Wonosobo berikut karakteristiknya serta merupakan penjelasan analisis statistik perekonomian daerah. Pada bagian ini, sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menguraikan dua point utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2016 serta proyeksi tahun 2017 dan 2018. Untuk itu pada bagian ini membahas tentang kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2016, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2017 dan 2018 serta arah kebijakan ekonomi tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan misi RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya. Yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari serta mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di mana tujuan tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Wonosobo yaitu untuk menciptakan Wonosobo yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo sesuai visi dan misi, maka disusun prioritas pembangunan dan kebijakan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Sedangkan dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan anggaran belanja didasarkan pada *money follow program prioritas*.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2018 diarahkan pada peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas semua sektor usaha yang didukung ketersediaan infrastruktur dan kepastian regulasi. Yang didukung dengan fokus prioritas pembangunan ekonomi yaitu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

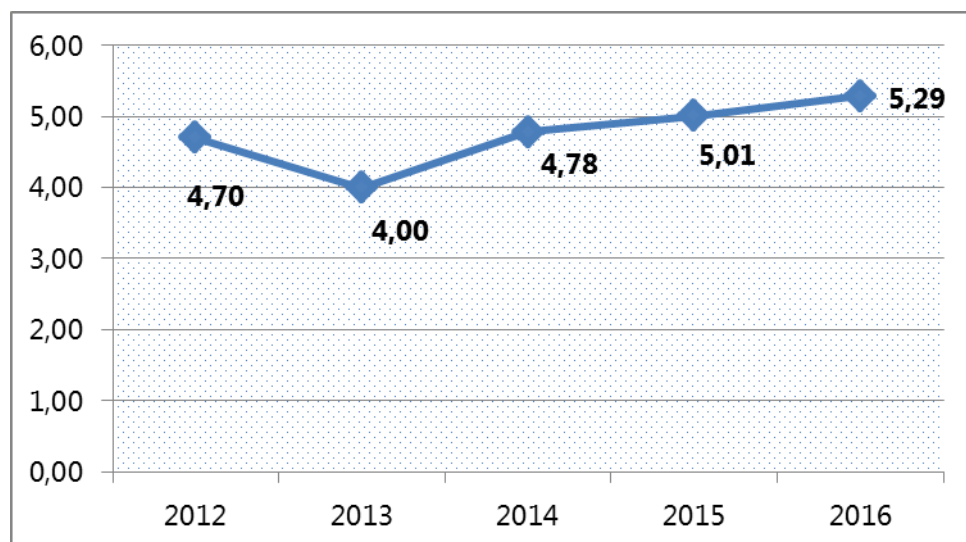
Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi banyak ditentukan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju inflasi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70% kemudian di tahun 2013 turun menjadi 4,00% dan selanjutnya semakin meningkat di tahun 2014 sebesar 4,78% diikuti tahun 2015 sebesar 5,01% dan tahun 2016 sebesar 5,29%.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik (2016), Bappeda (2017)

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari adanya peningkatan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Yang sebagian besar berada di lapangan usaha sektor primer yaitu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,18% dan meningkat signifikan sampai tahun 2016 sebesar 6,59%. Serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian, di mana pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,18% dan meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 3,97%.

Lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2016 adalah di sektor tersier yaitu jasa keuangan sebesar 9,14, jasa perusahaan sebesar 9,62% dan jasa lainnya sebesar 7,62. Sementara untuk sektor sekunder laju pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 5,45% dan di tahun 2016 menurun menjadi sebesar 1,08%. Demikian pula untuk lapangan usaha listrik dan gas pada tahun 2012 tumbuh sebesar 9,87% dan menurun menjadi 2,18% di tahun 2016.

Laju pertumbuhan Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun dasar 2010
Tahun 2012-2016 di Kabupaten Wonosobo

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan				
		2012	2013	2014*	2015**	2016***
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,18	-0,13	3,61	3,99	6,59
2	Pertambangan dan Penggalian	2,99	3,78	2,17	0,65	3,97
3	Industri Pengolahan	5,45	5,63	3,66	4,93	1,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,87	7,50	3,96	-3,04	2,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,87	9,32	6,59	2,17
6	Konstruksi	7,08	5,96	3,50	6,37	6,88
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,93	5,45	5,13	4,21	4,85
8	Transportasi dan Pergudangan	7,25	9,18	8,22	7,28	7,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	5,46	7,08	7,44	-0,34
10	Informasi dan Komunikasi	10,84	9,12	12,11	9,42	7,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	3,42	6,52	9,48	9,14
12	Real Estate	5,28	7,04	6,50	7,54	6,82
13	Jasa Perusahaan	5,91	10,84	9,07	10,17	9,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,72	2,35	0,95	5,25	2,47
15	Jasa Pendidikan	15,44	9,50	7,10	5,44	7,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	11,63	8,57	11,66	7,08	9,73
17	Jasa Lainnya	0,37	8,82	8,57	3,10	7,62
Laju pertumbuhan (%)		4,70	4,00	4,78	5,01	5,29

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo (2016), Bappeda (2017)

Ket : *), **) Angka sementara

***) Angka prediksi

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Wonosobo tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 10.893,45 milyar meningkat di tahun 2016 menjadi Rp. 15.417,28 milyar. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 dari Rp. 9.935,90 milyar di tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 11.971,10 milyar di tahun 2016. Dari tujuh belas lapangan usaha sebagian besar mengalami kenaikan baik untuk harga konstan maupun harga berlaku.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)					ADHK (Milyar Rupiah)				
		2012	2013	2014*)	2015**)	2016***)	2012	2013	2014*)	2015**)	2016***)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.740,26	3.910,22	4.298,97	4.668,67	5.142,73	3.406,76	3.402,32	3.525,02	3.665,58	3.907,32
2	Pertambangan dan Penggalian	102,25	109,52	120,30	131,04	140,88	96,13	99,76	101,92	102,59	106,66
3	Industri Pengolahan	1.832,25	1.980,08	2.211,03	2.404,99	2.528,53	1.621,38	1.712,64	1.775,39	1.862,99	1.883,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,85	3,92	4,09	4,18	4,64	3,90	4,19	4,36	4,23	4,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,04	13,45	15,00	16,46	17,30	12,86	12,98	14,19	15,12	15,45
6	Konstruksi	654,25	712,64	800,19	892,61	972,75	601,53	637,35	659,65	701,67	749,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.873,95	2.032,31	2.194,02	2.348,43	2.551,52	1.766,54	1.862,82	1.958,34	2.040,78	2.139,76
8	Transportasi dan Pergudangan	508,51	559,88	647,92	718,91	781,55	506,98	553,53	599,05	642,64	691,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	333,37	369,50	416,59	464,95	484,84	302,17	318,67	341,23	366,63	365,39
10	Informasi dan Komunikasi	118,63	126,73	136,46	148,22	159,20	119,77	130,69	146,52	160,32	172,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	314,37	341,45	381,02	437,63	490,42	272,56	281,89	300,28	328,73	358,77
12	Real Estate	159,40	171,01	191,57	212,05	229,21	155,18	166,11	176,90	190,24	203,20
13	Jasa Perusahaan	21,84	25,38	28,73	33,29	37,80	19,84	21,99	23,83	26,42	28,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297,26	318,06	341,92	374,46	404,50	264,07	270,27	272,83	287,16	294,15
15	Jasa Pendidikan	589,28	700,22	778,75	842,31	932,14	478,71	524,20	561,43	591,95	635,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,58	143,81	169,70	191,09	213,99	108,51	117,81	131,54	140,86	154,56
17	Jasa lainnya	205,36	231,35	268,09	286,20	325,28	199,01	216,56	235,13	242,41	260,88
PDRB		10.893,45	11.749,52	13.004,33	14.175,49	15.417,28	9.935,90	10.333,76	10.827,76	11.370,30	11.971,60

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo(2016), Bappeda (2017)

Ket: *) , **)Angka sementara

***) Angka prediksi

Perkembangan distribusi sektor ekonomi Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2012-2016 masih didominasi oleh lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2016 peranan lapangan usaha pertanian masih menduduki peringkat tertinggi sebesar 33,36 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,55 persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lapangan usaha terbesar dalam PDRB masih berada di sektor primer dan sektor sekunder. Jika dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan peranan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Sedangkan lapangan usaha yang lainnya dalam kondisi tetap atau mengalami penurunan. Perkembangan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)				
		2012	2013	2014*)	2015**)	2016***)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,32	33,28	33,06	32,93	33,36
2	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91
3	Industri Pengolahan	16,87	16,85	17,00	16,97	16,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11
6	Konstruksi	6,00	6,07	6,15	6,30	6,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,19	17,30	16,87	16,57	16,55
8	Transportasi dan Pergudangan	4,67	4,77	4,98	5,07	5,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,06	3,14	3,20	3,28	3,14
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,08	1,05	1,05	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,91	2,93	3,09	3,18
12	Real Estate	1,46	1,46	1,47	1,50	1,49
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,22	0,22	0,23	0,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,73	2,71	2,63	2,64	2,62
15	Jasa Pendidikan	5,41	5,96	5,99	5,94	6,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	1,15	1,22	1,30	1,35	1,39
17	Jasa Lainnya	1,88	1,97	2,06	2,02	2,11
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo (2016), Bappeda (2017)

Ket : *), **) Angka sementara

***) Angka prediksi

PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo tahun 2012-2016 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dimana pada tahun 2012 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 14.095.758,01 meningkat menjadi Rp. 18.241.145,35 di tahun 2016. Demikian pula PDRB ADHK tahun 2012 sebesar Rp. 12.849.654,41 meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 14.631.408,75.

PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
PDRB per Kapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2016

Tahun	ADHB	ADHK
2012	14.095.758,01	12.849.654,41
2013	15.376.623,73	13.523.806,66
2014*)	16.817.099,57	14.002.374,90
2015**)	18.241.145,35	14.631.408,75
2016***)		

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo (2016), Bappeda (2017)

Ket :) **) Angka sementara*

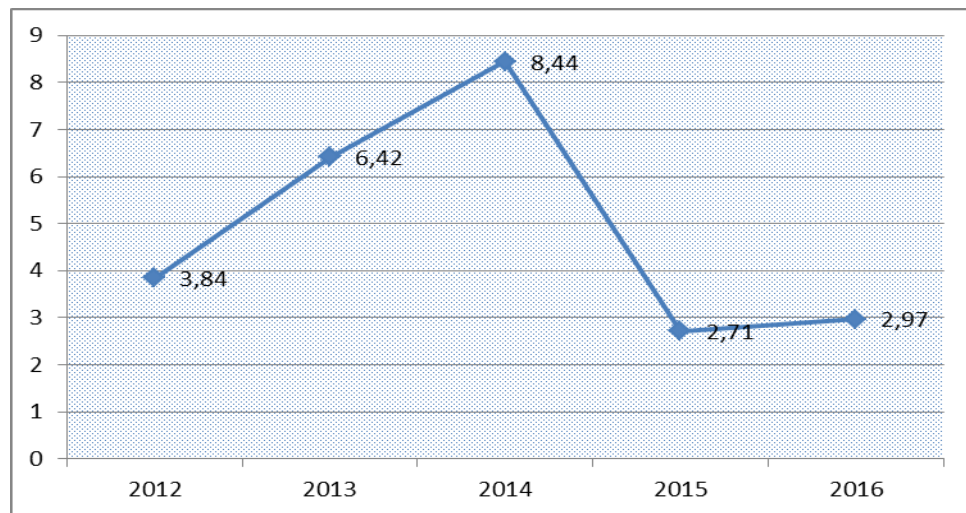
****) Angka prediksi*

c. Inflasi

Inflasi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu tahun 2012-2016 masih dalam batas yang wajar dengan angka inflasi pada tahun 2012 sebesar 3,84 dan tahun 2016 sebesar 2,97. Kondisi tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 (2,71) tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.

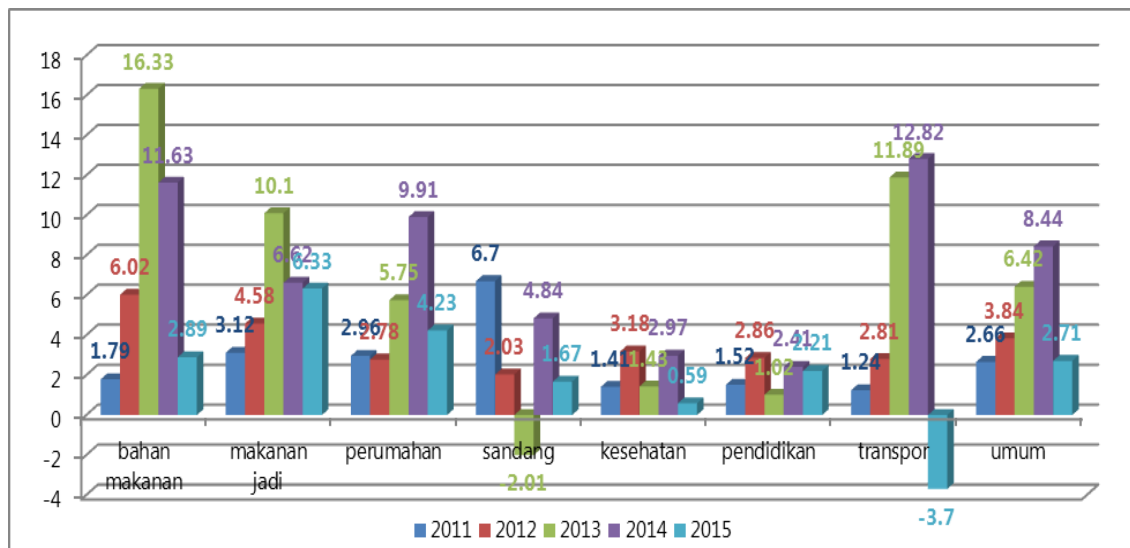
Gambar III.2 Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2013- 2017

Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi selama tahun 2012 sampai 2015 adalah bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan transportasi. Secara lengkap sumbangan komoditas pada angka inflasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.3 Sumbangan Komoditas untuk Angka Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2012-2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2017 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, turunnya harga komoditi ekspor, kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang akan berdampak pada melemahnya nilai tular rupiah.

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Masih banyaknya penduduk yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan.
2. Kenaikan tarif dasar listrik.
3. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dunia usaha.
4. Penurunan harga komoditas ekspor yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas Kabupaten Wonosobo.
5. Fluktuasi harga terutama pangan dan pasokannya.
6. Ekspektasi dunia usaha untuk meningkatkan daya serap angkatan kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran.
7. Meningkatkan tuntutan sertifikasi dan peningkatan standar kualitas produk.
8. Tingginya resiko bencana alam pada beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Letak geografis dan potensi ekonomi Kabupaten Wonosobo yang cukup besar di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan pariwisata.
2. Kualitas infrastruktur ekonomi yang semakin meningkat.
3. Potensi alam Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar berpotensi pariwisata.
4. Berkembangnya klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah.
5. Meningkatnya hilirisasi industri berbasis pertanian.
6. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi lokal.
7. Meningkatnya sinergitas kegiatan antar organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Wonosobo saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka

perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dan 2018 dapat diprediksikan sebagai mana tabel berikut.

Tabel III.5
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2015,
Target Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017-2018

No	Indikator	2014	2015	2016*)	2017*)	2018*)
1.	PDRB :					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	13.004,33	14.175,49	15.417,28	15.937,41	16.790,15
	Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	10.827,76	11.370,30	11.971,60	12.609,67	13.302,90
2.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,78	5,01	5,29	5,33	5,50
3.	Inflasi (%)	8,44	2,71	2,97	2,73	2,61
4.	PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp)	14,002,37	14.631,41	15.335,09	16.083,90	16.990,64
5.	Nilai realisasi investasi (Milyar Rp)	790	1.099	1.370	1.500	1.800
6.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,34	4,47	4,94	4,88	4,82
7.	Angka kemiskinan (%)	21,42	21,45	20,00	18,08	16,42
8.	NTP	107,85	108,00	110,00	112,00	114,00

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2013-2015; Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2016

*Ket : *) RPJMD Kabupaten Wonosobo, 2016-2021*

Sejalan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 yaitu "Pemantapan kualitas reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan" maka prioritas pembangunan ekonomi tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas antara lain melalui :

1. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa).
2. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan dan agroindustri.
3. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu.

5. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan.
6. Pembangunan ekonomi lokal melalui percepatan pengembangan koperasi, UMKM/IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis dan OVOP.
7. Peningkatan investasi dan ekspor komoditas unggulan.
8. Pengendalian inflasi daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD, sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten Wonosobo yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sedangkan tiga komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 25, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah akan berjalan apabila suatu daerah mempunyai kemampuan fiskal yang baik. Dengan adanya kemandirian keuangan daerah, suatu daerah dapat mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah ini dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo ke depan tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Adapun realisasi dan prediksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No	Uraian	2014	2015	Penetapan 2016	Penetapan 2017	Prediksi 2018
1	Pendapatan asli daerah	175.319,36	182.607,63	177.947,60	182.959,00	193.720,85
	Pajak daerah	26.122,82	27.484,14	27.612,50	30.100,00	32.905,00
	Retribusi daerah	23.816,88	9.967,18	9.918,98	9.926,85	10.057,73
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.179,05	9.290,54	11.877,00	13.587,20	14.945,93
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	117.200,61	135.865,76	128.539,09	129.344,95	135.812,19
2	Dana perimbangan	824.656,34	836.382,53	1.223.065,45	1.141.512,63	1.198.588,26
	Dana bagi hasil	40.988,32	31.393,03	38.219,81	39.023,03	40.974,19

No	Uraian	2014	2015	Penetapan 2016	Penetapan 2017	Prediksi 2018
	pajak/bukan pajak					
	Dana alokasi umum	724.245,01	748.447,76	841.407,18	841.407,18	883.477,53
	Dana alokasi khusus	59.423,01	56.541,74	343.438,47	261.082,42	274.136,54
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	277.169,97	413.169,49	322.944,41	415.202,28	440.922,96
	Hibah	5.000,00	0,00	6.000,00	11.084,00	6.000,00
	Bagi hasil pajak	47.049,30	81.707,80	100.681,55	100.681,55	105.715,63
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	169.467,71	198.827,67	0,00	0,00	0,00
	Bantuan keuangan	55.652,96	132.634,02	66.209,39	66.209,39	72.803,33
	ADD	0.00	0,00	150.053,47	191.496,63	210.646,29
	Dana insentif daerah	0,00	0,00	0,00	45.730,72	45.730,72
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1.277.145,67	1.432.159,65	1.723.957,43	1.739.673,92	1.831.232,07

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo (2014-2017), Bappeda Kabupaten Wonosobo (2017)

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah pada dasarnya tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka kebijakan yang ditempuh antara lain :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, yang diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan regulasi di bidang pendapatan asli daerah dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
- b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu serta retribusi daerah.
- c. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen, dalam upaya peningkatan deviden/kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak secara bertahap.
- f. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (komputerisasi).
- g. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah.
- i. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah.
- j. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- k. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.
- l. Monitoring sumber-sumber pendapatan untuk mengurangi kebocoran.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari iput yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2018.

Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara terus –menerus dilaksanakan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dengan melakukan realisasi anggaran tepat waktu.

2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
5. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Transparansi dan akuntabel, setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung diarahkan untuk :

- a. RPJMD 2016-2021, prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pemerintah pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah delapan (8) urusan; *Sustainable Development Goals (SDGs); kemiskinan*.
- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional.
- c. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan.
- e. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.
- f. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan.
- g. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018, meliputi:
 - 1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
 - 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*).
 - 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah.
 - 4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan.
 - 5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 - 6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM.
 - 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
 - 8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

Belanja daerah dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan terkait dengan fasilitasi kesejahteraan guru non PNS, jaminan kesehatan daerah dan peningkatan biaya hibah untuk penanggulangan kemiskinan berupa rumah tidak layak huni, jambanisasi dan lain- lain. Demikian pula untuk belanja langsung dari tahun ke tahun relatif meningkat dikarenakan kebutuhan pembangunan daerah dari tahun ke tahun juga semakin meningkat.

Tabel III.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No	Uraian	2014	2015	Penetapan 2016	Penetapan 2017	Prediksi 2018
1	Belanja tidak langsung	710.674,84	880.919,99	1.182.219,04	1.095.558,80	1.146.582,89
	Belanja pegawai	628.028,93	694.946,39	919.902,36	779.953,57	808.334,14
	Belanja hibah	25.416,56	30.628,17	10.433,60	15.935,60	17.529,16
	Belanja bantuan sosial	3.340,36	2.991,64	85,50	10.000,00	11.000,00
	Belanja bagi hasil kepada Kab & Pemerintah Desa	0,00	3.060,32	4.096,27	4.003,00	4.403,30
	Belanja bantuan keuangan	51.418,02	147.026,67	239.701,30	280.666,63	299.816,29
	Belanja tidak terduga	2.470,97	2.266,80	8.000,00	5.000,00	5.500,00
2	Belanja langsung	509.648,80	613.527,30	763.717,30	706.892,11	737.649,18
	Belanja pegawai	13.752,05	21.883,82	22.500,41		
	Belanja barang dan jasa	289.798,74	334.222,42	318.726,48		
	Belanja modal	206.098,01	257.421,06	356.848,95		
	TOTAL JUMLAH BELANJA (1+2)	1.220.323,64	1.494.447,29	1.945.936,34	1.802.450,92	1.880.231,73

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo (2014-2017), Bappeda Kabupaten Wonosobo (2017)

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2014-2016 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 belum merencanakan SiLPA. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, diarahkan untuk mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Tabel III.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No	Uraian	2014	2015	Penetapan 2016	Penetapan 2017	Prediksi 2018
1	Penerimaan pembiayaan	297.208,76	342.065,87	238.009,50	72.777,00	0,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	297.157,83	327.766,82	238.009,50	72.777,00	0,00
	Pencairan dana cadangan	0,00	14.232,28	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	50,93	66,77	0,00	0,00	0,00
2	Pengeluaran pembiayaan	26.263,97	41.768,74	16.030,59	10.000,00	10.000,00
	Pembentukan dana cadangan	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan modal daerah	19.263,97	41.768,74	16.030,59	10.000,00	10.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		270.944,79	300.297,14	221.978,91	62.777,00	10.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, 2014-2017; Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017